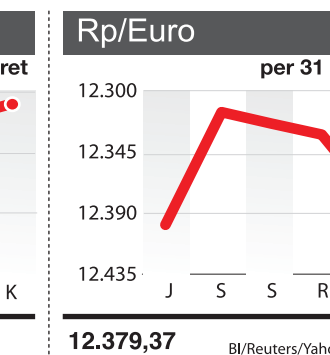
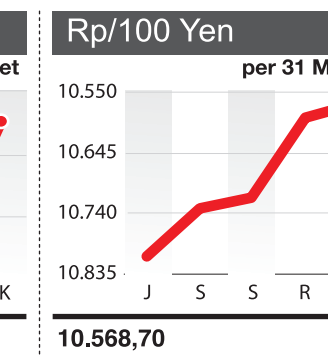
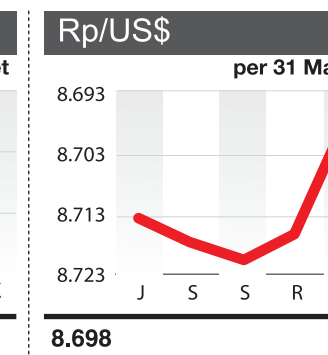
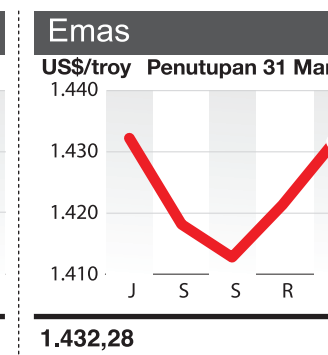
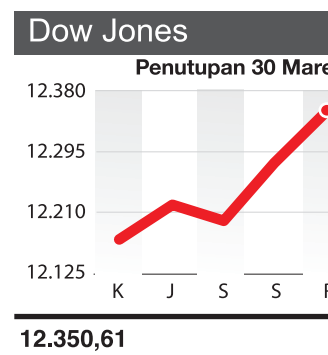
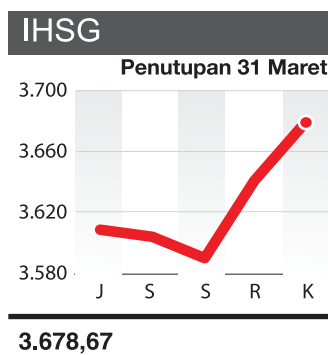
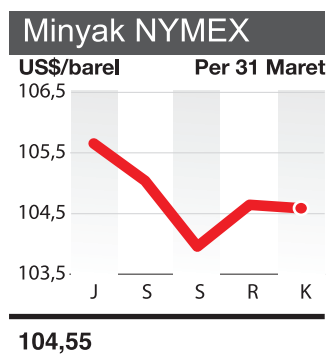


Hadapi West Ham, MU Krisis Pemain Belakang

Sulit bagi skuat besutan Alex Ferguson itu untuk meraih *treble* winner musim ini.

Olahraga, Hlm 24



Berdasarkan Segmen Bisnis

Bank	Kredit Korporasi	Kredit Ritel	Kredit Konsumsi	
			KPR	Non-KPR
BRI	10,68	12,86	11,49	13,00
Mandiri	11,25	13,00	11,75	13,25
BNI	10,75	13,05	12,72	10,93
BTN	10,10	10,10	10,85	10,85
Danamon	11,00	13,00	12,50	23,60
CIMB Niaga	11,25	11,50	11,25	11,50
BCA	9,00	11,00	9,50	10,05
Bukopin	10,48	13,85	12,81	12,99
BII	10,09	10,96	10,83	9,72
Permata	10,75	11,25	12,00	-
Panin	10,45	10,45	10,95	10,95
UOB Buana	11,32	12,03	10,10	-
OCBC NISP	9,50	10,50	12,50	12,50

Suku Bunga Dasar Kredit (Prime Lending Rate) 13 Bank Besar per 31 Maret 2011 (%)

Sumber: Berdasarkan data per 31 Maret 2011 dari situs resmi setiap bank/ Foto: MI/ROMMY PUJANTO/ Grafis: CAKSONG

Atasi Dumping, Pemerintah Susun Rencana Aksi

DEMI menyikapi ancaman barang impor yang terindikasi dumping, pemerintah tengah menyusun rencana aksi. Menteri Perindustrian MS Hidayat, sebagai ketua tim perencanaan akan melakukan koordinasi lintas kementerian untuk menyelaraskan aturan dan langkah-langkahnya.

Hal tersebut diungkapkan Hidayat sebelum menghadiri sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden Jakarta, kemarin. Para menteri terkait dijadwalkan akan membahas rencana aksi itu pekan depan.

"Kita mau membuat *action plan* (rencana aksi) bersama, dan itu akan datang dari saya untuk melindungi. Di antaranya dengan *safeguard* dan juga antidumping," ujar Hidayat.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Kerja Sama Industri Internasional, Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Agus Tjahjaya mengatakan berdasarkan hasil survei harga barang China di Indonesia, terdapat 190 produk yang perlu ditelaah lebih lanjut.

Sebanyak 38 produk ditemukan berharga jual lebih murah (dumping) daripada harga jual di pasar domestik China. Produk-produk yang terindikasi dumping didominasi mainan anak dan elektronik.

Hidayat mengatakan, jika praktik dumping tidak segera disikapi, produk dalam negeri akan semakin tergerus oleh produk impor. Meski demikian, proses menuju diterapkannya antidumping memerlukan waktu panjang, bahkan bisa melebihi satu tahun.

Sementara itu, Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu mengatakan sebelum sampai kepada pemberlakuan *safeguard*, ada prosedur yang harus dilewati. Salah satunya memastikan bahwa memang terjadi praktik dumping melalui investigasi oleh Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI).

Pada kesempatan terpisah, KPPI mengumumkan pemberian *safeguard* terhadap beberapa produk baja dan kain tenun dari kapas.

Pemerintah akan mengenaikan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTMP) selama tiga tahun terhadap beberapa produk baja dan kain tenun dari kapas.

Sekretaris Eksekutif KPPI Djoko Mulyono mengungkapkan langkah itu diambil karena pelaku usaha lokal banyak menderita kerugian akibat serbuan produk impor kawat baja dan kain tenun kapas. Mayoritas impor lima produk yang dikenakan BMTMP berasal dari China. (Mad/Jaz/E-1)

Induk Grup Bakrie Rugi Rp7,6 Triliun

PT Bakrie & Brothers Tbk (BNBR), induk usaha Grup Bakrie, membukukan kerugian Rp7,641 triliun sepanjang tahun 2010. Kerugian itu naik 340% jika dibandingkan dengan kerugian tahun sebelumnya yang sebesar Rp1,735 triliun.

Sebelumnya, perseroan sempat keliru dalam publikasi dengan menyebutkan kerugian diderita hanya sebesar Rp7,64 miliar. Namun, manajemen kemudian merevisi nilai kerugian menjadi Rp7,64 triliun.

"Seharusnya ditulis Rp7,64 triliun," ujar Direktur BNBR Siddharta Moersjid dalam siaran pers perseroan di Jakarta, kemarin.

Menurutnya, kerugian perseroan disebabkan membengkaknya beban lain-lain hingga Rp9,483 triliun tahun lalu, atau naik 342% ketimbang 2009 yang sebesar Rp2,146 triliun. Lonjakan beban tersebut antara lain berasal dari rugi penjualan saham yang mencapai Rp10,258 triliun. (Atp/E-5)

Kepemilikan Saham TV akan Dibatasi

SEBUAH perusahaan diperbolehkan memiliki saham beberapa stasiun televisi swasta sekaligus, baik di pusat maupun di daerah. Akan tetapi, besarnya diusulkan untuk dibatasi hingga 39%.

Usul itu disampaikan Ketua Pemantau Regulasi dan Regulator Media Amir Effendi Siregar pada diskusi Mengawal Revisi Undang-Undang Penyiaran yang diselenggarakan di Solo, Jawa Tengah, kemarin.

"Usulan yang dikemukakan Bapak Amir Siregar itu menarik. Walau harus dimaklumi pula bahwa penggabungan sejumlah stasiun televisi sekarang ini lebih merupakan upaya untuk bertahan hidup di tengah persaingan yang semakin ketat," jelas Ketua Panitia Perubahan UU Penyiaran Haryono Isman. Saat ini proses revisi UU Penyiaran masih dalam tahap pembahasan di panja DPR RI dan ditargetkan rampung pada November 2011. (FR/E-5)

Bunga Dasar Dua Digit Bank Jauh dari Efisien

BI mewajibkan publikasi SBDK di surat kabar selambatnya setiap tujuh hari kerja setelah akhir Maret, Juni, September, dan Desember.

MARCHELO

SUKU bunga dasar kredit (SBDK) perbankan rata-rata berada di kisaran 11%-13%. Demikian terungkap dari hasil pantauan Bank Indonesia (BI) pada hari pertama penerapan kewajiban bank mengumumkan SBDK ke nasabah dan publik, kemarin.

Pengamat ekonomi Universitas Atma Jaya A Prasetyantoko mengatakan rata-rata SBDK tersebut terlampaui tinggi karena semestinya bisa satu digit. Hal itu semakin menguatkan bukti perbankan belum efisien. Perekonomian nasional yang kurang efisien pun turut

berkontribusi.

"Secara umum saya melihat masih tinggi karena masih 2 digit," kata Prasetyantoko ketika dihubungi, kemarin. Menurut dia, tingginya SBDK merupakan pekerjaan rumah bagi perbankan dan perekonomian Indonesia secara makro.

Berdasarkan pengumuman yang dilakukan bank-bank di situsnya dan informasi tambahan dari satuan kerja pengawasan bank, kisaran SBDK untuk setiap jenis kredit adalah 7%-13% untuk kredit korporasi, 9%-21,9% untuk kredit ritel, 8,73%-14,1% untuk kredit pemilihan rumah (KPR), dan 9,72%-23,6% untuk kredit konsumsi non-KPR.

Prasetyantoko juga menyatakan variasi SBDK perbankan Indonesia masih sangat lebar atau belum terlalu seragam. Menurutnya, hal itu disebabkan kondisi dan efisiensi perbankan yang cukup jauh berbeda.

"Tujuan BI dengan transparansi suku bunga dasar kredit setidaknya tercapai. Ternyata kita melihat suku bunga masih tinggi dan setiap bank ternyata memiliki kondisi yang berbeda-beda," tutur Prasetyantoko.

BI melalui surat edarannya mewajibkan bank memublikasikan SBDK di kantor-kantornya, situs, dan surat. Selanjutnya, setiap kali ada perubahan, bank juga harus mengumumkan perubahan tersebut.

Publikasi SBDK di surat kabar selambat-lambatnya tujuh hari kerja setelah akhir bulan Maret, Juni, September, dan Desember. Selanjutnya bank wajib menyampaikan fotokopi atau guntingan surat

kepada BI paling lambat 2 hari kerja setelah dipublikasikan.

Untuk sementara ini, kewajiban tersebut hanya berlaku bagi bank dengan aset Rp10 triliun atau lebih. Berdasarkan data terakhir per 31 Maret 2011, terdapat 42 bank yang memenuhi kriteria itu.

Belum umumkan

Dari hasil pantauan, beberapa bank swasta terlihat belum mengumumkan SBDK melalui situs maupun kantornya. Seperti di kantor cabang pembantu sebuah bank campuran yang berlogo identik dengan warna merah.

Bahkan seorang pegawai di kantor cabang pembantu itu tidak mengetahui perihal publikasi SBDK pada banknya. "SBDK itu apa ya? Kita enggak pernah dengar soal itu," ujarnya.

Sementara itu, dua bank

plat merah terlihat sudah memajang angka SBDK dengan sebuah papan plastik di kantor cabang pembantunya.

Wimboh menegaskan BI sudah memperingatkan semua bank yang belum mengumumkan SBDK. Jika tidak dipenuhi, BI akan memberikan teguran administratif dan denda.

"Ini menjadi catatan BI untuk meminta komitmen kepada bank untuk tidak melakukan lagi. Kalau melanggar lagi akan ada sanksi lebih berat lagi."

Ke depan BI akan mengkaji komponen SBDK bank. Langkah berikutnya, bank didorong untuk meningkatkan efisiensi bila komponen SBDK-nya dinilai melewati batas kewajaran.

Komponen SBDK terdiri dari harga pokok dana kredit, biaya *overhead*, dan margin keuntungan bank dalam proses kredit. (E-1)

marchelo@mediaindonesia.com

Infrastruktur Butuh Kepastian Kerja Sama

TANTANGAN utama percepatan pembangunan infrastruktur di Tanah Air saat ini adalah pembenahan skema kerja sama pemerintah-swasta (KPS). Pilihan atas skema tersebut didasarkan pada keterbatasan dana APBN periode 2010-2014 yang hanya mengalokasikan 29% pendanaan untuk infrastruktur.

Karena itu, perlu ada forum bagi pemerintah pusat, provinsi, dan sektor swasta untuk memantapkan proyek-proyek yang sedang berlangsung dan masih dalam proposal. Hal itu mencuat dalam konferensi

pers Indonesia International Infrastructure 2011: Conference and Exhibition (IICE) di Jakarta, kemarin.

"Tahap pertama IICE 2011 adalah menggabungkan Kadin, Bappenas, dan BKPM dalam pembangunan infrastruktur empat tahun mendatang," ujar Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Suryo Bambang Sulisto.

Dalam jangka pendek, konferensi yang digelar 11-14 April itu diharapkan memunculkan komitmen untuk menindaklanjuti program infrastruktur termasuk 16 proyek masterplan

Investor butuh kemudahan agar tertarik menanamkan modal di infrastruktur."

Suryo B Sulisto
Ketua Umum Kadin

KPS senilai US\$32 miliar.

Suryo mendesak pemerintah segera mendorong kepastian skema KPS ini. Menurutnya, kontribusi swasta membutuhkan stimulus fiskal dan moneter untuk merangsang penanam modal ke sektor infrastruktur.

"Infrastruktur pengembalian modalnya berjangka panjang sampai 10 tahun. Investor butuh kemudahan agar tertarik menanamkan modal," sambungnya.

Pada kesempatan yang sama, Deputi Kepala BKPM Bidang Perencanaan Penanaman Modal Himawan Hariyoga mengatakan pemerintah akan menerbitkan aturan *tax holiday* pada pertengahan April sebagai payung hukum pemberian insentif pajak bagi investor pembangunan infrastruktur.

"Insentif *tax holiday* yang diberikan pemerintah akan berlaku 5 hingga 8 tahun terhitung

sejak insentif diberikan."

Sementara itu, Asisten Deputi Menko Perekonomian Wahyu Utomo menegaskan, pemerintah menargetkan peningkatan alokasi dana pusat, daerah, BUMN, dan swasta sebesar 6% dari produk domestik bruto (PDB) untuk pembangunan infrastruktur. Kini alokasi dana hanya 3% dari PDB.

Saat ini terdapat 16 proyek masterplan KPS dengan total estimasi investasi US\$32 miliar. Salah satu proyek yang akan dikedepankan adalah Jembatan Selat Sunda yang ditaksir mencapai US\$25 miliar. (SZ/E-2)